**PERAN LEMBAGA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM
MENUNJANG REFORMASI KEPOLISIAN MENURUT PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL**

Oleh: Kintan Kurnia Putri
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.,
Pembimbing II: Dr. Junaidi, S.H., M.H
Alamat: Jl. Damai, Tengkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau.
Email: Kintan.kurnia0417@student.unri.ac.id / Telepon: 0822-8323-7367

ABSTRACT

In 2022 alone, there were 3 important events that created chaos and tarnished the face of the Indonesian National Police (Polri), apart from the Kanjuruhan Tragedy. Two other tragedies, namely the murder of Brigadier Yosua Hutabarat by the Head of Propam Polri Division, Inspector General Ferdy Sambo, to the arrest of Inspector General Teddy Minahasa who had just been appointed as East Java Regional Police Chief due to alleged drug crimes. Government Regulation no. 17 of 2011 concerning Kopolnas, gives Kopolnas authority to oversee the performance of national police institutions. However, in practice Kopolnas still has some weaknesses. Even though Kopolnas is an institution that is directly responsible to the President, Kopolnas is not necessarily able to intervene in the police. This makes Kopolnas still too weak and it is still highly expected to be able to carry out its oversight function over Polri

This research is normative juridical research, because this research was conducted by examining secondary data and an approach to laws, this normative research examines the applicable regulations and relates them to the role of the national police commission in supporting police reform according to presidential regulation No. 17 of 2011 amendment to Presidential regulation number 17 of 2005 concerning the National Police Commission.

The results of the study examine and analyze the existence and position of Kopolnas in the institutional structure of the Indonesian state, based on the push for reform which demands the restructuring of the Indonesian National Police (Polri), as well as formulating the ideal functions and authorities of the National Police Commission (Kopolnas).

Keywords: Authority, Position, National Police Commission.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban hingga 135 orang, mendapat perhatian luas, baik secara nasional maupun internasional. Tragedi sepakbola yang disebut menjadi tragedi kedua terburuk dalam sejarah sepakbola internasional, menjadi puncak masalah yang selama ini menghantui institusi kepolisian nasional Indonesia. Sepanjang 2022 saja, peneliti mencatat ada 3 peristiwa penting yang menciptakan keriuhan dan mencoreng wajah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), selain Tragedi Kanjuruhan tersebut. Dua tragedi lainnya, ialah pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, hingga penangkapan Irjen Teddy Minahasa yang baru saja diangkat sebagai Kapolda Jatim akibat dugaan tindak pidana narkoba.

Selain itu, salah satu kinerja kepolisian yang bisa dijadikan tolak ukur bahwa kinerja kepolisian juga mempunyai kendala internal maupun eksternal yaitu dalam peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru, kendala internal yang dilalui berupa Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polisi Resort Kota Pekanbaru, Rendahnya biaya operasional, Kurangnya jumlahnya personil. Kendala eksternal yaitu berupa Faktor

Peraturan Perundang-undangan, Faktor Orangtua.¹

Opini buruk yang menyerang kinerja kepolisian ini akibat peristiwa yang penulis sebutkan diatas, memantik ingatan publik atas kinerja harian kepolisian yang sering bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Lini masa Twitter seringkali dibuat riuh atas cuitan warganet yang mengeluhkan kinerja aparat kepolisian. Hal-hal ini pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan pada publik pada Agustus 2022, sebesar 70% dan menurun tajam pada Oktober 2022 menjadi sebesar 53%.²

Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo merupakan hal yang wajar, Jika merujuk pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan,

¹M.Fathra Fahasta & Dodi Haryono, "Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru", Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014.

²<https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>, diakses, tanggal, 1 Desember 2022, pukul 12.42

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.³ Sehingga citra dan opini negatif yang menyerang kepolisian, akan berimplikasi negatif kepada citra pemerintahan dan presiden itu sendiri. Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat atau disingkat tap MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*Beschikking*).⁴

Dasar hukum pembentukan Kompolnas, dapat dilihat pada Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut lagi, aturan pembentukan Kompolnas diperkuat dengan hadirnya Peraturan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Kehadiran Peraturan Presiden ini, mendorong profesionalisme, akuntabilitas, dan kemandirian Kompolnas. Dalam aturan baru tersebut juga, akhirnya Kompolnas memiliki kewenangan untuk memeriksa anggota Polri dan ikut dalam sidang-sidang etik Polri.⁵

³Mochammed Nasser, "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, hlm. 109.

⁴Jendri Heri Sumarta & Dodi Haryono, "Politik Hukum Pengembalian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.

⁵*Ibid*, hlm 96-116.

Seperti diketahui selama ini Kompolnas hanya memiliki tiga wewenang awal, yaitu memberi pertimbangan kepada Presiden RI mengenai kandidat calon Kapolri, memberikan saran kebijakan kepada Kapolri dan minta keterangan kepada Kapolri. Namun, pada kenyataannya kinerja Kompolnas dinilai masih belum optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Kompolnas, Novel Ali dalam beberapa pemberitaan di media massa. Arif menyatakan bahwa wewenang Kompolnas tidaklah terlalu besar, hingga dia mengibaratkan Kompolnas bagai "macan ompong" karena lemahnya kewenangan Kompolnas.⁶ Sebagai contoh, dalam proses gelar perkara, peran Kompolnas sebagai pemantau kinerja kepolisian agar dapat obyektif dalam melaksanakan tugasnya.⁷

Di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) juga sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Pidana.⁸ Sementara itu, guna membangun institusi kepolisian yang profesional dan terpercaya, dibutuhkan

⁶*Ibid*.

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/kompolnas-bisa-ikuti-pemeriksaan-pelanggaran-kode-etik-lt4d942aad0ca72> diakses, tanggal, 29 November 2022.

⁸ Mukhlis R, "Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia" Artikel pada *Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi*, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 126.

pembentukan komitmen politik yang tegas. Komitmen politik tersebut, terwujud dalam kewenangan politik dalam sistem kenegaraan yang mencakup substansi pembentukan kebijakan dan jaminan atas terlaksananya akuntabilitas institusi pengawas.⁹

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang sebelumnya pernah dilakukan memiliki kesamaan arah fokus pembahasan penelitian, namun juga terdapat beberapa perbedaan pembahasan. Penelitian terdahulu juga merupakan acuan penulis dalam mengkaji penelitian.

Maka dari itu, dibutuhkan perluasan kewenangan Kompolnas dalam Peraturan Presiden agar dapat menjadi lembaga yang mampu memastikan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat atas keamanan dan ketertiban publik, dapat tercapai. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Peran Lembaga Komisi Kepolisian Nasional dalam Menunjang Reformasi Kepolisian Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Komisi Kepolisian Nasional dalam struktur kelembagaan nasional Indonesia?

⁹Rahman Amin dan Muhammad Fikri Al Aziz, *Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri*, Jakarta, Jurnal Kartha Bhayangkara Vol. 17, No. 1, 2023.

2. Apakah keberadaan Komisi Kepolisian Nasional telah dapat menjaga integritas dan profesionalisme Lembaga Kepolisian?
3. Bagaimana idealnya kedudukan dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional untuk menguatkan integritas dan profesionalitas Komisi Kepolisian Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Kepolisian Nasional dalam struktur kelembagaan Indonesia.
- b. Untuk Mengetahui keberadaan Komisi Kepolisian Nasional telah dapat menjaga integritas dan profesionalisme Lembaga Kepolisian.
- c. Untuk mengetahui bagaimana idealnya kedudukan dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional untuk menguatkan integritas dan profesionalitas Komisi Kepolisian Nasional

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan universitas riau serta sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum tata negara serta dapat diharapkan

memberikan sumbangan pemikiran sebagai *ius constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan dalam menciptakan kepastian hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Secara definitif, pengawasan dapat dimaknai sebagai proses untuk menjamin tujuan-tujuan suatu kelompok atau organisasi dapat tercapai. Muchan menjelaskan, bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada penilaian atas suatu kegiatan, telah berkesesuaian dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.¹⁰

Teori pengawasan mengacu pada proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan aparat negara sesuai dengan hukum dan etika.

2. Teori Kewenangan Lembaga Negara

Di dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan yang namanya kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering kali disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan juga sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan

sering juga disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ Ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.¹¹

Kewenangan yang berasal dari rakyat dilimpahkan kepada presiden. Kemudian sebagai penanggung jawab pemerintah presiden menyerahkan dan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan melalui Undang-Undang.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Kepolisian Menurut Momo Kelana, bahwa istilah Polisi merupakan istilah yang awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni politea, yang memiliki arti keseluruhan pemerintah negara kota(polis), dimana pada masa tersebut arti Politea meliputi seluruh pemerintah negara kota di Yunani termasuk urusan keagamaan, namun setelah adanya agama (Nasrani), kemudian urusan agama dipisahkan dari urusan pemerintah, dengan demikian arti Politeia adalah pemerintah secara keseluruhan, tanpa urusan agama.¹³

¹¹Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm.35-36.

¹²Hanif Nurcholis, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 66.

¹³I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian; Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung; Refika Aditama, 2018, hlm 1.

¹⁰Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 126

2. Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kopolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia.¹⁴
3. Reformasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah atau memperbaiki keadaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

- 5) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
- 6) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, ataupun hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lainnya yang

¹⁴ www.kopolnas.go.id/hubungi-kami, diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

¹⁵*Ibid.*

ada kaitannya pokok permasalahan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi berasal dari kata *politeia* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.¹⁷

2. Sejarah Kepolisian di Indonesia

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-

undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pada pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada masa pendudukan Jepang, susunan organisasi kepolisian terbagi-bagi menjadi beberapa regional dan tidak terpusat, dimana masing-masing regional mempunyai kantor sendiri. Pembagian regional tersebut merupakan pembagian daerah pertahanan militer Jepang di Asia Tenggara dan di bawah komando Markas Besar Tentara Selatan di Singapura. Pada masa pemerintahan Jepang, Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Syu (setingkat karesidenan sekarang) dan dua koci (daerah kerajaan yaitu Yogyakarta dan Surakarta).

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 20

¹⁷ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor : R. Schenkhuizen, 1953, Hlm. 10.

operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.¹⁸

3. Kedudukan Kepolisian Dalam Sistem Ketatanegaraan

Kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan ini, mendekati pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam mengartikan istilah kedudukan lembaga negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga Negara didasarkan pada fungsi utamanya.¹⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun tentang Polri, yang mana fungsi kepolisian adalah salah fungsi

negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan .nan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 No, 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. **Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian**

Dalam pelaksanaan wewenang kepolisian didasarkan pada tiga asas yakni:

- a. Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan.
- b. Asas plichmatigheid ialah asas dimana polisi sudah dianggap sah berdasarkan sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum.
- c. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.²⁰

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal

¹⁸Suryama M. Sastra, *Meningkatkan Kontrol Terhadap Polri Dalam Masa Transisi*, Jakarta: LESPERSI –DECAF, 3 September 2007, Hlm. 3

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan*, Yogyakarta: 2005, Hlm. X

²⁰Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta. Laksbang Persindo. Hlm. 3

tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

B. Hak Politik Penyandang Tunanetra di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Komisi Kepolisian Nasional

Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional atas Keputusan Presiden dan sebagai pembantu presiden, maka sebagai konsekuensi logis keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Surat Keputusan Presiden, termasuk susunan organisasi dan tata cara kerja Komisi, sedangkan untuk pembiayaan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di dalam Pasal 8 Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri merumuskan secara jelas eksistensi Lembaga Kepolisian Nasional yang substansinya.

2. Tugas dan Wewenang Komisi Kepolisian Nasional

Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional bertujuan untuk membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan

pemberhentian Kapolri. Untuk tujuan tersebut, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri ketentuan mengenai kedudukan dan tugas Kopolnas diatur dalam BAB VI. Menurut UU No 2 tahun 2002 kedudukan Kopolnas di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara tugas dan kewenangan Kopolnas diatur dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2, yang mana pada ayat 1 menjelaskan bahwa Komisi Kepolisian Nasional bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.²¹

Melihat dari tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional terlihat dengan jelas, bahwa pembentukan Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan ketentuan Undang-undang, akan tetapi penyelenggaraannya ditujukan untuk kepentingan Presiden dalam menentukan arah kebijakan lembaga kepolisian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional dalam struktur kelembagaan Nasional Indonesia

Pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia pada dasarnya dibentuk karena lembaga yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan

²¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 38 ayat 1 dan 2

yang ada. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri merupakan suatu bentuk ketidakpercayaan publik atas lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.²²

Banyak pendapat mengenai suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebagian besar berpendapat bahwa ada 3 (tiga) landasan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis (filosofische grondslag), landasan sosiologis (sociologische grondslag), dan landasan yuridis (juridische grondslag). Ketiga landasan tersebut secara bersama-sama harus diformulasikan ke dalam suatu perundang-undangan yang baik.²³

Dengan adanya ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang TNI dan Polri sebagai dasar hukum untuk memperkuat Polri, bahwa pembentukan Polri dibentuk untuk membantu Presiden di bidang kepolisian nasional, selain itu untuk memperkuat lembaga tersebut disusunlah Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemisahan kepolisian dari ABRI, bertujuan untuk menciptakan polisi yang profesional dan tidak bernuansa militeristik.²⁴ Sahetapy,

Awaloeddin Djamin, dan Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Sejarah Perkembangan Kepolisian Indonesia*, berpendapat bahwa terdapat perbedaan bahwa terdapat perbedaan substansial antara polisi dan tentara. Tentara berfungsi untuk mengamankan negara dan menggunakan kekerasan serta dapat mengabaikan HAM. Sedangkan polisi, berperan untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan mengutamakan pendekatan persuasif serta berperspektif HAM.²⁵

Pemisahan Polri dari ABRI, berimplikasi kepada semakin kuatnya posisi Polri secara politis. Kewenangan menyusun dan memiliki anggaran sendiri, menjadi sebuah *privilege* bagi Polri yang telah “disipilkan”. Kuatnya kepolisian, menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Kekhawatiran atas kondisi kepolisian ini, pada akhirnya memunculkan wacana pembentukan lembaga pengawasan eksternal. Pembentukan lembaga eksternal ini, diharapkan mampu mendorong profesionalisme Polri pada titik paripurna.

Menurut Novel Ali, Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk terus memperhatikan dan melaksanakan tiga hal dalam institusi Polri yang harus dibenahi untuk menaikkan citra Polri dimata masyarakat. Tiga hal tersebut antara

²²T.M Luthfi Yazid, *Komisi-Komisi Nasional dalam Konteks Cita-Cita Negara Hukum*, Jakarta, 9 September 2004, Hlm. 2.

²³ Buku Dodi Haryono, *Ilmu perundang-undangan*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 31

²⁴ <https://tirto.id/sejarah-pemisahan-polri-dengan-abri-dan-pertanyaan-tentang-harapan-f67k> diakses pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 21:05.

²⁵ Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI, 2006. Hlm. 66

lain: kinerja, keberpihakan pada rakyat kecil, dan hasil kerja.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polri dalam menciptakan kepolisian yang berintegritas dan profesionalitas. Pertama, Polri harus berupaya meningkatkan profesionalisme.²⁷ Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dengan demikian, tingkat profesionalismenya dapat diamati dari seberapa jauh fungsi-fungsi tersebut telah dilaksanakan. Bila Polri diakui mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik oleh masyarakat, saat itulah dapat dinilai peningkatan kualitas profesionalismenya.

Kedua, Polri harus dapat merebut hati masyarakat. Hanya dengan memahami karakter masyarakat, menaruh simpati dan empati yang tinggi terhadap penderitaan masyarakat, serta betul-betul menempatkan diri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat tanpa pembedaan.²⁸ Ketiga, Polri adalah kemampuan mengembangkan kerja sama internasional.²⁹

Apabila Kompolnas bersama Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal yang selaras dengan terciptanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan Polri, maka akan terwujud suatu hasil yang ideal antara pelaksanaan tugas, kinerja dan hasil kerja Polri yang akan menaikkan citra Polri di masyarakat.

Dengan demikian, istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan.³⁰ Bila ada pertentangan peraturan secara hierarki digunakan asas *lex superiori derogad lex inferiori*. Oleh karena itu, asas hukum dapat diharapkan bersifat lebih leluasa agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari pertentangan antara peraturan yang bersifat umum dan khusus.³¹

B. Upaya Komisis Kepolisian Nasional Dalam Menjaga Integritas dan Profesionalisme Lembaga Kepolisian

Salah satu upaya utama Kompolnas adalah melakukan pengawasan terhadap anggota kepolisian. Mereka melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etika atau hukum yang melibatkan polisi.

²⁶ Yani Nur Syamsu, Menuju Polri Idaman (Rakyat), Sindo, Selasa 3 Juli 2007, hlm.7

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yani Nur Syamsu, Op.Cit.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dodi Haryono, Ilmu perundang-undangan, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 65

³¹ Dessy Artina, dkk, "Penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, 21 Agustus 2019, hlm. 2

Melalui proses ini, Kompolnas dapat menentukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan mengambil tindakan yang sesuai.³²

Salah satunya kasus pemerasan oleh anggota Kepolisian kepada korban kasus penipuan Richard Mille. Kasus yang dilaporkan oleh kuasa hukum Richard Mille, bernama Tony Trisno ini pada 9 Januari 2023. Ada tiga keluhan penanganan perkara yang dilaporkan oleh Tony Trisno. Ketiga kasus tersebut, ialah penghentian kasus penipuan Ferrari, penipuan McLaren, dan kasus penipuan arloji, yang didalamnya memiliki dugaan kuat adanya tindakan pemerasan. Dalam surat balasan Kompolnas kepada kuasa hukum, pada 9 Februari 2023, Kompolnas menyatakan pengaduan pihak Tony Trisno dengan nomor registrasi 99/33/RES/1/2023/Kompolnas telah dilaporkan kepada Kapolri.³³ Sebagai contoh faktual, Kompolnas melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah operasi penangkapan di suatu wilayah.

Contoh-contoh tersebut menggambarkan upaya konkret yang dilakukan oleh Kompolnas dalam menjaga integritas dan profesionalitas lembaga kepolisian.

³² <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/3/1661/kerja-sama-dengan-kompolnas-komnas-ham-optimalikan-pengawasan-di-area-kerja-kepolisian.html>, diakses 20 Juni 2023 Pukul 22:53 WIB.

³³ [Kompolnas Tindak Lanjuti Laporan Kasus Richard Mille \(rmol.id\)](https://www.rmol.id) diakses pada tanggal 7 juli 2023, pukul 22:20.

Melalui tindakan pengawasan, penegakan disiplin, pelatihan, dan perlindungan hak asasi manusia, Kompolnas berperan aktif dalam memastikan bahwa anggota kepolisian menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan profesionalisme yang tinggi.

Secara keseluruhan, upaya Kompolnas dalam menjaga integritas dan profesionalitas lembaga kepolisian terus berlangsung melalui berbagai langkah konkret yang dilakukan. Dengan pengawasan yang ketat, penegakan disiplin yang tegas, pelatihan yang berkualitas, dan keterlibatan masyarakat yang aktif, diharapkan lembaga kepolisian dapat menjadi institusi yang profesional, bertanggung jawab, dan terpercaya dalam melindungi keamanan dan kepentingan masyarakat.

C. Konsep Ideal Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Nasional Dalam Mengoptimalkan Integritas dan Profesionalitas Komisi Kepolisian Nasional

Kedudukan Polri yang langsung berada dibawah Presiden dan terpusat, menjadi posisi Polri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan dan melaksanakan fungsi operasional sekaligus. Harus diakui bahwa posisi Polri seperti ini, merupakan kondisi yang tidak ideal dan tidak tepat bagi tata pemerintahan yang baik.³⁴

Posisi Polri yang tidak ideal ini, membuatnya menjadi lembaga yang *super power*. Posisi seperti ini,

³⁴ *Ibid.* hlm. 34.

dikhawatirkan malah membuat Polri memiliki tendensi melakukan *abuse of power*. Sehingga, untuk memastikan Polri tidak menjadi lembaga yang bertendensi melakukan *abuse of power*, peran Kopolnas sangatlah penting. Namun, sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, peran Kopolnas masih terbatas pada pemberian rekomendasi terhadap Presiden, dalam rangka pelaksanaan manajerial Polri dan pengangkatan atau pemberhentian Kapolri. Padahal sejatinya, Kopolnas yang diwakili unsur Pemerintah, Kepolisian, dan masyarakat, memegang kunci penting dalam pelaksanaan mekanisme *check and balances*. Dalam konteks Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia, perbandingan pola reformasi kepolisian, dapat dibandingkan dengan Komisi Nasional Keamanan Umum Kekaisaran Jepang atau yang disebut *Kokkakouaniinkai*. *Kokkakouaniinkai* adalah badan tertinggi dalam sistem kepolisian Jepang dan berada dalam pengawasan Kantor Perdana Menteri.³⁵

Peran Badan Kepolisian Nasional juga menentukan standar dan kebijakan umum jika terjadi keadaan darurat nasional atau bencana alam, selain itu berwenang dalam memberi perintah kepada pasukan kepolisian, melaksanakan kebijakan nasional, mengumpulkan

informasi, dan merumuskan kebijakan.

Secara garis besar, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua lembaga ini. Perbedaan yang paling mencolok adalah tentang kuatnya peran Komisi Nasional Keamanan Umum Jepang dalam mengontrol kebijakan kepolisian. Selain itu, sistem kepolisian yang terdesentralisasi, menjadikan masyarakat memiliki peran dan kontrol yang kuat terhadap aktivitas kepolisian. Pertanggungjawaban Kepala Kepolisian Prefektur kepada Gubernur Prefektur dan terbentuknya Dewan *Kouban* di tingkat lokal, menjadikan Kepolisian Jepang tidak dapat semena-mena dalam menggunakan kekuatannya ketika melakukan penindakan kejahatan. Berbanding terbalik dengan Kopolnas yang hanya berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden dan tidak mampu melakukan intervensi kebijakan kepolisian.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Kopolnas dalam dalam struktur kelembagaan negara Indonesia, didasari oleh desakan reformasi yang menuntut restrukturisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
2. Keberadaan dan kedudukan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dinilai sudah menjaga integritas dan profesionalisme Lembaga Kepolisian. Hal ini tercermin dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Kopolnas yaitu melakukan penyelidikan dan

³⁵ Reni Wahyuniarti, *Sistem Kepolisian Jepang : Interaksi Kouban dengan Masyarakat, Skripsi*, Universitas Indonesia, 2009, Hlm. 20.

pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etika atau hukum yang melibatkan anggota Polri.

3. Kedudukan dan Fungsi ideal yang seharusnya diterapkan pada Kompolnas demi mewujudkan penguatan integritas dan profesionalitas Komisi Kepolisian Nasional yaitu harus bersifat Desentralisasi. Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) adalah polisi nasional yang sifatnya tersentralisasi.

B. Saran

Perlu diadakannya revisi undang-undang kepolisian guna menguatkan peran dan fungsi dari Komisi Kepolisian Nasional. Penguatan peran dan fungsi ini, dimaksudkan untuk menjamin pengawasan yang ideal dari Kompolnas kepada Polri. Kompolnas harus menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas struktur administrasi dan kebijakan strategis kepolisian, sehingga Polri hanya bertanggung jawab dalam urusan operasional saja. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kompolnas, hanya bersifat rekomendatif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan atau rekomendasi Kompolnas hanya akan berfungsi ketika menerima tekanan politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zulkhaedir. Konsep Dasar Reformasi dan Reformasi Administrasi Publik, Bandung : Media Sains Indonesia. 2021.
- Amir, Yasraf Piliang. Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya. Bandung:Mizan. 2001.

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,. 1998.

Djamin, Awaloedin. Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI. 2006.

Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. 2005.

Nur,Yani Syamsu. Menuju Polri Idaman (Rakyat). Sindo. 2007.

Nurcholis, Hanif. Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. Jakarta: Grasindo. 2005.

Raharjo Satjipto. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Genta Publishing. 2009.

Sadjijono. Memahami Hukum Kepolisian, Surabaya: Laksbang. 2009.

Siregar, Sarah Nuraini. Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010. Yogyakarta: ANDI. 2021.

Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. Mengenal Profesi Penegak Hukum. Yogyakarta: Medpress. 2015

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. 1996

B. Jurnal/Skripsi

Cindy Destiani, 2023, “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik “, *Jurnal Pengabdian West Science*, Universitas Pelita Harapan, Vol. 02, No. 06.

Cryshnanda DL, 2004. “*Koban dan Chuzaisho (Bentuk Pemolisian Komuniti Kepolisian Jepang)*”,

- Jurnal Polisi Indonesia, Vol. 6, No. 2.
- Edi Saputra Hasibuan, 2019. “*Komisi Kepolisian dalam Perbandingan*”, Jakarta, Jurnal Kartha Bhayangkara”. Vol 13 No. 2.
- Jendri Heri Sumarta & Dodi Haryono, 2015 “*Politik Hukum Pengembalian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 2, No. 2 Oktober.
- M.Fathra Fahasta & Dodi Haryono, “*Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Amak Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014.
- Intan Fitri Meutia, 2017. “*Penerapan Chiki Keibi Sebagai Implementasi Community Policing di Jepang*”, *Journal, Of Community Studies*, Universitas Lampung, Vol. 2 No. 1 Maret.
- Reni Wahyuniarti, 2009, “*Sistem Kepolisian Jepang : interaksi Kouban dengan Masyarakat*”, Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional
- D. Website**
- <https://kbbi.we.id/asas>
- <https://pergeseran.paradigma.tentang.penyandang.disabilitas.dalam.undang-undang.nomor.8.tahun.2016>, Binus.ac.id
- <https://www.beritasatu.com/news/836499/agustus-20202021-kompolnas-terima-4112-laporan-pengaduan> diakses, tanggal, 29 November 2022.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kompolnas-bisa-ikuti-pemeriksaan-pelanggaran-kode-etik-lt4d942aad0ca72> diakses, tanggal, 29 November 2022.
- <https://tirto.id/sejarah-pemisahan-polri-dengan-abri-dan-pertanyaan-tentang-harapan-f67k> diakses pada tanggal 19 Juni 2023.